



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR 934/IV/XI/2016

**Bali Berpotensi Besar
Jadi Sentra Produksi Daging**

**Ketua DPR RI Kutuk Keras
Pelaku Bom Samarinda**

**Merauke Bisa Jadi Penyuplai
Pangan Nasional**



GRATIS
Tidak Diperjualbelikan



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto

Bali Potensi Besar Jadi Sentra Produksi Daging

Komisi IV DPR RI meninjau langsung kesiapan dalam rangka upaya swasembada daging di Sentra Peternakan Rakyat (SPR) Jayagiri di Desa Belok/Sidan, Kabupaten Badung, Bali, Minggu (13/11). Dalam kunjungannya ke SPR Jayagiri, Komisi IV DPR RI berdialog langsung dengan para peternak sapi.

Pejabat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, I Ketut Diarmita menjelaskan, sapi Bali merupakan salah satu sapi unggul Indonesia. Sapi ini memiliki kemampuan adaptasi dan tingkat fertilitas tinggi. Sehingga nilai jualnya pun sangat tinggi. "Ini menjadi potensi lokal yang harus terus digali dan dioptimalkan," ungkapnya.

Selama ini, pemerintah telah mengucurkan bantuan diantaranya proyek inseminasi dari semen beku. Ini bertujuan untuk meningkatkan produksi. Bantuan tersebut masuk dalam program 'wajib bunting' yang sedang diusung

Kementerian Pertanian bidang peternakan.

Selain bantuan program ini, pemerintah juga memberi bantuan penguatan pakan. Bantuan ini meliputi pemberian pakan sebanyak dua kg per hari selama 150 hari. Bantuan diberikan pada sejumlah anggota SPR.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto mengatakan bahwa Bali memiliki potensi yang sangat besar menjadi sentra produksi daging sapi. Sapi Bali memiliki kualitas yang sangat tinggi dan tidak kalah dengan sapi dari Australia.

"Bali sangat memungkinkan untuk

menjadi salah satu sentra produksi daging dalam skala besar, sehingga peternaknya perlu terus dibina dan dikembangkan," terang Titiek.

"Budidaya di Sentra Peternakan Rakyat Jayagiri ini bagus sekali buat masyarakat, keberhasilan getah birahi itu bagus juga, sangat memuaskan, sapi jantannya bisa mencapai 500 kg itu bagus sekali," terangnya.

Politisi Partai Golkar ini berharap pembinaan harus terus dilakukan kepada peternak sapi terutama Bali, sehingga potensi yang sangat besar ini dimaksimalkan dan tentunya swasembada daging sapi bisa terwujud. ■

DPR RI Komitmen Percepat Pembahasan RUU

Ketua DPR RI Ade Komarudin mengatakan DPR RI berkomitmen untuk mempercepat proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang menjadi prioritas tahun 2016. Hal tersebut ditegaskannya dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan II Tahun 2016-2017, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/11).



Ketua DPR RI Ade Komarudin saat Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan II Tahun 2016-2017

“ Mengingat masa sidang ini singkat, DPR RI berkomitmen mempercepat proses pembahasan RUU. Untuk itu, pimpinan DPR RI mengimbau kepada seluruh komisi, badan maupun pansus agar tetap memprioritaskan penyelesaian tugas-tugas legislasi dengan tetap memperhatikan kualitas RUU,” pesan Akom, sapaan akrabnya dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.

Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, lanjut Akom, DPR RI akan melakukan persiapan penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017. Selanjutnya, DPR RI juga akan melakukan dan menyelesaikan pemantapan 4 RUU yang masih dalam proses harmonisasi di Badan Legislasi (Baleg).

Keempat RUU itu adalah RUU tentang perubahan atas UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, RUU tentang Perubahan atas UU No.5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara, RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dan RUU tentang Perkelapasawitan.

Selain itu, politisi dari F-Golkar itu menambahkan, ada lima RUU yang sudah memasuki tahapan pembahasan di Komisi maupun Pansus dan diharapkan akan selesai pada masa sidang ini, yakni RUU tentang Jasa konstruksi, RUU tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di bagian timur Selat Singapura, RUU tentang Kekarantinaan

Kesehatan, RUU tentang Sistem Perbukuan, dan RUU tentang Kebudayaan.

Selain itu, terkait dengan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu, Akom mengatakan DPR RI akan melakukan pembahasan secara intensif dan maraton. Pasalnya, RUU ini akan menjadi landasan pemilihan umum tahun 2019 yang akan dilakukan secara serentak, yaitu pemilu Anggota DPR RI, DPD RI, dan DPRD dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

“RUU ini penting karena akan menandai babak baru dalam sejarah Pemilu di Indonesia. Untuk itu, DPR RI bersama Pemerintah dan penyelenggara pemilu bersinergi dalam upaya menyelesaikan RUU ini agar tepat waktu sesuai dengan tahapan penyelenggaraan pemilu,” tandas politisi dari dapil Jawa Barat VII itu.

Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, pembahasan APBN telah selesai dilaksanakan sesuai siklus dan mekanisme yang ada sehingga proses UU APBN menjadi DIPA adalah proses internal pada pemerintah.

Akom berharap agar pemerintah melakukan pengelolaan keuangan negara dalam APBN 2017 secara transparan dan akuntabel sehingga serapan anggaran dapat berjalan sesuai dengan program yang telah direncanakan.

“DPR RI juga akan melakukan pemantauan dana transfer ke daerah dan dana desa serta melihat potensi pendapatan negara di bidang perpajakan dan migas,” imbuhnya. ■

(anra.mp) foto:tin.parle

BULETIN PARLEMENTARIA



PENGAWAS UMUM Pimpinan DPR RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH** Dr. Winantuningtyas Titi Swasanany, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI) **WAKIL KETUA PENGARAH** Dra. Damayanti, M.Si (DEPUTI PERSIDANGAN) **PIMPINAN PELAKSANA** Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen) **PIMPINAN REDAKSI** Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak) **WK. PIMPINAN REDAKSI** Dra. Tri Hastuti (Kasubag Media Cetak), Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis), Insan Abdirrohman, S.H, M.Si (Kasubag MedSos dan Website) **REDAKTUR** Mastur Prantono, Nita Juwita, S.Sos **SEKRETARIS REDAKSI** Suciati, S.Sos, Bagus Mudjiharjanto **ANGGOTA REDAKSI** Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati, Muhammad Husen, Sofyan Efendi, Virginne Meiske Patuli, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega **REDAKTUR FOTO** Eka Hindra, Iwan Armanias **FOTOGRAFER** Rizka Arinindya, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah, Andi M. Ilham, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief Rachman, R. Kresno PD Moempoeni, Azka Restu Fadilah **ADMINISTRASI FOTO** Hasri Mentari **ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA** Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI Gedung Nusantara II Lt. 3 Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: DPR RI.pemberitaan@gmail.com, www.DPR RI.go.id/berita

PIMPINAN PENERBITAN Djujiawan Widjaya, S.Sos. M.AP (Kabag Penerbitan), **WK. PIMPINAN PENERBITAN** Mediantoro, SE (Kasubag Produksi), Pesta Evaria Simbolon, SE. M.Si (Kasubag Distribusi) **STAFF PRODUKSI** Eko Muriyanto, Barliansyah, Fathurahman, Mujiono, Farid, SE **SIRKULASI** Abdul Kahfi, S.Kom, Remon Ifan, Siti Rondiyah, Oji, Arif, Lamin **Telp.** 021-571 5697 **Fax.** 021-571 5421 **Email** penerbitanDPR RI@gmail.com

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS) | ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN |

Ketua DPR RI Tegaskan RUU Pemilu Harus Selesai April 2017

Ketua DPR RI Ade Komarudin menerima kunjungan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di ruang kerjanya Rabu sore, (16/11) guna membahas sejumlah poin terkait RUU Penyelenggaraan Pemilu. Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk menyatukan tekad agar pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu nantinya tidak berlarut-larut.

“Menyangkut UU pemilu, kita berdiskusi menyatukan tekad bersama agar pembahasan RUU Pemilu tidak berlarut-larut, berjalan efisien, efektif dan produktif,” kata Akom, sapaan akrabnya.

Politisi Golkar itu menegaskan pembahasan RUU Pemilu harus selesai pada April 2017, “Kita pasang target selesai pada April tahun depan. April, Mei itu batas yang kita tentukan,” kata Akom.

Ketua DPR RI menjelaskan, langkah pertama yang akan dilakukan agar pembahasan RUU Pemilu tidak tersendat adalah mengumpulkan pimpinan fraksi. Kemudian membahas langkah-langkah yang akan dilakukan.

“Saya akan diskusi dengan para ketua fraksi dan sekretaris sebagai



Ketua DPR RI Ade Komarudin terima Mendagri

perpanjangan masing-masing partai. Nanti akan tentukan sikapnya. Nanti kami akan menentukan tekad bersama karena pemilu harus berlangsung sesuai keinginan kita bersama agar proses demokrasi berjalan seperti sediakala,” kata Akom.

Jika pembahasan RUU Pemilu

tersendat, kata dia, ada resiko besar terkait pelaksanaan Pemilu di Indonesia yang akan terganggu.

“Terganggunya tahapan pemilu, maka terganggu demokrasi kita. Pemilu bukan hanya legislatif, tapi juga pemilu presiden. Ini serentak. Kita bahas ini harus maksimal dengan target waktu yang

ada,” terangnya.

Ia pun juga menjelaskan akan terus berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dalam pembahasan RUU Pemilu ini. “Kita akan koordinasi terus dengan Pak Mendagri sebagai wakil pemerintah,” ia menambahkan. ■

(bump)/focanandri/retu.

Proteksionisme Tembakau Harus Dilakukan

Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Fahri Hamzah menerima Asosiasi Petani Tembakau Indonesia, yang ingin memberikan dorongan semangat agar RUU Pertembakauan dapat segera disahkan.

“Proteksionisme terkait dengan tembakau harus dilakukan, karena satu-satunya cara kita menjaga keluhuran adalah dari cara kita memandang tembakau dan lain-lainnya dengan proteksi. Di dalam Undang-undang itu harus mencakup secara komplit, jangan hanya melindungi petani tetapi tidak melindungi masyarakat. Jangan pula hanya melindungi industri tetapi tidak melindungi kesehatan masyarakat,” ucap Fahri di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/11/2016).

Menurut Fahri, melindungi petani itu tidak harus dengan merusak berbagai

hal lainnya, tetapi dengan memperbaiki sisi kehidupan bangsa lainnya secara bersamaan. “Publik harus menyoroti masalah ini, karena menyangkut banyak pihak. Petani tembakau ingin diproteksi dari impor, dan memang semua rakyat Indonesia harus dilindungi produksinya. Sementara kepentingan industri adalah harga tembakau murah, bahan baku yang tersedia dan terjangkau. Dan kepentingan pemodal adalah bisa membangun banyak pabrik disini,” ujarnya.



Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra, Fahri Hamzah

Ia juga menjelaskan, problem lainnya juga adalah pemodal-pemodal asing yang melakukan repatriasi. Banyak negara di dunia yang saat ini tidak memperbolehkan pabrik tembakau di negaranya. Kemudian mereka mencari tempat usaha, dan mungkin saja Indonesia menjadi sasaran tempat usaha tersebut.

"Bila Indonesia hanya menjadi sasaran tempat usaha bagi mereka, pabriknya ada disini tetapi tenaga kerjanya orang asing, barangnya juga di impor dari luar, kemudian diproduksi

secara masal disini, maka kita hanya akan menjadi pasar. Karena produk tersebut dijual secara masif, maka mengakibatkan petani tembakau kita mengalami kehancuran. Setelah mereka memperoleh keuntungan lalu modalnya dibawa lagi ke luar negeri," tandas Fahri.

Ini adalah *early dirty capitalism* yang sejak jaman Bung Karno sudah dilawan. Karena itu, tugas DPR RI sebagai regulator harus menggunakan strategi terbalik, yakni keberadaan undang-undang ini harus bisa menjamin

produksi petani, melarang impor dengan strategi regulasi tertentu.

"Dengan menggunakan sumber daya alam dan SDM kita sendiri, maka rekrutmen tenaga kerja meningkat. Apalagi dikelola oleh usaha dalam negeri, maka uangnya akan bertahan dan bisa digunakan untuk investasi dalam negeri. Bila perlu setelah itu, kita serang pasar ekspor. Negara harus memberikan instrumen kepada produsen dan industrialis untuk mudah menyerang pasar luar," pungkasnya. ■

(dep.mip)/facrumi/rev.

DPR RI Minta Masyarakat Tidak Terprovokasi Bom Samarinda

Wakil Ketua DPR RI bidang Korekku Taufik Kurniawan meminta masyarakat tidak terprovokasi pasca ledakan diduga berasal dari bom molotov di Gereja Oikumene, Samarinda, Kalimantan Timur, pada pekan lalu. Menurutnya, sebagai warga negara yang baik, seharusnya turut menjaga keharmonisan umat beragama.

“ Dalam kesempatan ini, saya imbau kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tidak panik, jangan takut dan jangan terprovokasi dengan peristiwa ini. Sudah kewajiban kita sebagai anak bangsa untuk ikut menjaga keharmonisan dan kerukunan umat beragama serta membantu pemerintah menghadapi aksi-aksi seperti ini,” kata Taufik, dalam rilis yang diterima Parlemen, Senin (14/11).

Politisi F-PAN itu menilai, aksi-aksi seperti itu termasuk kejahatan luar biasa yang memerlukan penanganan khusus dan ekstra serta memerlukan dukungan rakyat Indonesia. Menurutnya, aksi itu ditujukan bukan hanya untuk warga Samarinda saja, namun kepada seluruh rakyat Indonesia.

"Karena itu saya ingatkan kita jangan sampai terpengaruh, apalagi mau dipecah belah. Rakyat Indonesia tentu mengesampingkan perbuatan keji tersebut karena apa pun alasannya, kekerasan bukan solusi penyelesaian masalah," tegas Taufik.

Menurutnya, kekerasan tidak

pernah menjadi pilihan oleh agama apa pun, apalagi dengan kondisi Indonesia yang aman dan damai serta kebhinekaan menjadi pemersatu seluruh elemen dan anak bangsa dibawah NKRI. Namun Taufik enggan menyimpulkan peristiwa tersebut adalah aksi terorisme, apalagi mengaitkannya dengan sentimen agama.

Dirinya sangat mengecam dan mengutuk keras aksi tersebut karena di luar akal sehat dan sangat jauh dari nilai-nilai perikemanusiaan, apalagi nilai-nilai keagamaan. Menurutnya, sentimen yang seharusnya mengarahkan pada kehidupan yang damai dan



Wakil Ketua DPR RI bidang Korekku, Taufik Kurniawan

harmonis, sesuai dengan prinsip dan nilai keagamaan yang senantiasa menjadikan kedamaian sebagai tujuan bersama.

Di satu sisi, politisi asal dapil Jawa Tengah itu mengapresiasi kinerja Polda Kalimantan Timur yang berhasil menangkap pelaku dalam kondisi hidup sehingga dapat diketahui maksud dari aksinya tersebut. ■

(df), foto: kreano/br.

Fadli Zon Akan Teruskan Aspirasi HMI

Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam Fadli Zon pada Jumat, (11/11) menerima audiensi dari Kesatuan Aksi Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) guna membahas penangkapan sejumlah aktivis HMI pasca aksi demonstrasi 4 November lalu.

Bertempat di Ruang Tamu Pimpinan DPR RI, sekelompok orang yang mengatasnamakan Kesatuan Aksi Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menyampaikan pernyataan sikap yang menegaskan penangkapan terhadap kader HMI adalah bentuk kriminalisasi terhadap aktivis mahasiswa dan merupakan bukti nyata bahwa pemerintahan Jokowi anti kritik dan anti demokrasi.

Selain itu, dalam pernyataan sikap lainnya, mereka juga mendesak Kapolri untuk memecat Kapolda Metro Jaya yang menurut mereka telah terbukti melakukan provokasi massa aksi bela Islam untuk mengejar, menangkap dan memukul kader HMI yang dinilai sebagai bentuk pendeskreditan HMI.

Menanggapi beberapa pernyataan tersebut, Fadli Zon menegaskan akan meneruskan aspirasi tersebut kepada pihak terkait. "Kita akan meneruskan aspirasi ini kepada pihak terkait. Dan di Komisi III juga kan mitra kerjanya Kapolri," ujarnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Selain itu, Politisi Gerindra tersebut juga menegaskan bahwa aksi yang dilakukan pada tanggal 4 November telah diupayakan berlangsung secara damai. "Saya melihat aksi itu dilakukan dengan sangat damai, saya di lapangan memantau langsung demo itu dan betul betul menghindari bentrokan. Saya juga termasuk berpendapat seharusnya ada satu penegakan hukum yang cepat dan cermat terkait tuntutan masyarakat," ujar Fadli.

Ketika ditanya mengenai kehadirannya dalam aksi 4 November,



Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam, Fadli Zon

Fadli menegaskan bahwa hal itu adalah hal yang biasa. "Anggota DPR RI berdemo itu biasa aja. Ini bagian dari fungsi pengawasan. Seharusnya kepolisian proporsional dan profesional dalam menanggapi pokok permasalahan," tuturnya.

Ia pun menegaskan, sebagai wakil rakyat akan terus berupaya

menjalankan fungsi pengawasan dan akan meneruskannya hasil audiensi ini kepada Komisi III agar dapat segera dibicarakan hal yang bersifat teknis. "Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, kami akan melakukan sejumlah hal yang dianggap perlu. Hal yang bersifat teknis prosedural menyangkut fungsi pengawasan akan saya teruskan ke Komisi III," sambungnya.

Fadli pun menegaskan akan tetap mendukung segala aksi damai yang bersifat konstitusional dan menolak

segala bentuk kriminalisasi dalam menjalankan tugas konstitusional tersebut "Tentu kita akan mendukung segala aksi damai yang bersifat konstitusional dan itu sudah terjadi. Kita juga akan menolak segala bentuk kriminalisasi dalam menjalankan apa yang menjadi hak konstitusional kita," tutup Fadli. ■

(hs)/fotografi/fadli/rii

Ketua DPR RI Temui KOMPAK dan Apresiasi Bupati Bekasi

Ketua DPR RI, Ade Komarudin mengapresiasi kinerja pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Hal tersebut terungkap dalam kunjungan resesnya ke Kampung Burangkeng, Desa Cileduk, Kecamatan Setu Bekasi Jawa Barat, Senin (14/11).

“Kunjungan reses kali ini sengaja saya gunakan untuk bersilaturahmi dengan konstituen saya di Setu Bekasi, khususnya untuk bertemu dengan rekan, sahabat dan saudara-saudara saya yang bisa dikatakan menjadi tim sukses atau tim pemenangan saya dalam Pileg (pemilihan legislative) 2014 lalu. Dibanding beberapa tahun lalu saat pertama kali saya datang ke daerah ini, kondisi jalan sekarang jauh lebih baik, tidak lagi becek, dan jauh lebih luas dibanding sebelumnya. Hal itu tentu berkat usaha dari Bupati Bekasi dan jajarannya. Untuk itu saya mengapresiasi kinerja tersebut,” ujar Akom, begitu ia biasa disapa.

Dilanjutkan Akom, sebagai politisi maupun pribadi dirinya tidak akan pernah

Ketua DPR RI Minta FSAB Dijadikan Suri Tauladan

Ketua DPR RI Ade Komarudin meminta kepada masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah berlangsungnya tahapan Pilkada DKI Jakarta. Ia mengatakan agar Forum Silaturahmi Anak Bangsa (FSAB) yang dipimpin Suryo Susilo dapat dijadikan suri tauladan bagi masyarakat dalam mengatasi perbedaan pendapat. Hal itu disampaikan saat menerima audiensi FSAB pada Selasa, (15/11) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Sebagaimana diketahui, FSAB adalah forum komunikasi yang terdiri dari putera-puteri para pahlawan revolusi dan anak eks PKI yang diketahui berasal dari cara pandang yang berbeda. Meskipun memiliki latar belakang pemikiran berbeda, kini dapat bersatu dalam wadah FSAB.

"Pada konteks sekarang ini, FSAB harus memberikan perhatian menjadi suri tauladan bagi yang lain. Bapak-ibu adalah para anak dari tokoh besar di negeri ini pada masanya, yang berbeda pendapat sangat jauh, bahkan mungkin sampai pertumpahan darah, bisa bersatu. Apalagi yang sekarang hanya karena Pilkada DKI," ujar Akom.

Politisi Golkar ini menuturkan agar FSAB ini dapat menjadi *role model* untuk saling memaafkan dan melihat masa



Ketua DPR RI Ade Komarudin

depan untuk menentukan sikap dan tindakan. "Kita harus hormati keanekaragaman. Saya minta tolong agar FSAB ini menjadi *role model* bagi sikap memaafkan, melihat masa depan. Tolong ditularkan pada masyarakat lainnya," jelasnya.

Akom pun tidak ingin persatuan bangsa menjadi terganggu hanya karena

Pilkada DKI, ia ingin persatuan bangsa selalu dijunjung tinggi. "Kita gak boleh membayar mahal persatuan nasional hanya karena Pilkada DKI. Kita berharap agar ke depan tidak terjadi lagi benturan yang tajam seperti di masa lalu, cukuplah di tahun 1998," ujarnya.

Ia pun juga mengingatkan agar mayoritas tidak menindas yang minoritas. Keduanya harus dapat saling berhubungan harmoni dalam persatuan bangsa. "Jangan sampai juga mayoritas menindas minoritas. Kita tidak boleh lagi membedakan suku, agama, etnis. Pokoknya yang penting adalah warga negara Indonesia, Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan supaya negara ini tetap utuh." tegasnya.

Akom pun tidak ikhlas negeri ini menjadi terganggu stabilitasnya hanya karena momentum Pilkada DKI. "Saya terus terang saja sangat tidak ikhlas kalau negeri ini terkoyak hanya karena Pilgub DKI," tandas alumni UIN Jakarta ini. ■

(b.mfp), foto: anandri/br.



Ketua DPR RI Ade Komarudin

lupa dengan orang-orang yang telah ikut membantu mengantarkannya ke Gedung DPR RI untuk kelima kalinya. Oleh karenanya pada kesempatan itu ia berusaha

untuk mendengarkan secara langsung aspirasi dari masyarakat khususnya Tim Pemenangan Akom yang kerap disebut dengan nama KOMPAK (Kelompok Pemenangan Ade Komarudin).

"Salah satu aspirasinya terkait infrastruktur. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa kondisi jalan utama di daerah ini sekarang jauh lebih baik. Walaupun memang belum menyentuh jalan-jalan kecil atau gang-gang, namun masih sebatas jalan utama saja. Namun dengan kesempatan ke dua yang akan diberikan oleh masyarakat Kabupaten Bekasi, saya yakin

ke depan tidak hanya jalan utama saja yang akan diperbaiki, namun juga infrastruktur di jalan-jalan kecil akan ikut diperbaiki," papar Akom di tengah-tengah konstituennya.

Akom menambahkan, meskipun pada pemilihan legislatif mendatang dirinya berencana tidak maju alias mencalonkan diri lagi menjadi anggota legislatif, namun pihaknya tidak akan lupa dengan masyarakat Bekasi yang telah mempercayakan dirinya menjadi wakilnya di DPR RI selama lima periode. Oleh karenanya ia berharap agar silaturahmi dengan masyarakat Bekasi dan konstituen di Dapilnya tidak putus hanya sebatas pemilihan legislatif semata. Namun juga di berbagai kesempatan lainnya. ■

(Ayo), foto: anandri/br.

Ketua DPR RI Kutuk Keras Pelaku Bom Samarinda

Ketua DPR RI, Ade Komarudin mengutuk keras pelaku pemboman di depan Gereja Oikumene, Samarinda, Kalimantan Timur. Hal tersebut diungkapkannya usai kunjungan kerjanya di Kabupaten Bekasi, Senin (14/11).

“ Saya mengutuk keras pelaku pemboman Gereja di Samarinda h i n g g a



Ketua DPR RI Ade Komarudin

menewaskan seorang anak yang tidak berdosa," ujar Akom, begitu ia biasa disapa.

Terlebih lagi, lanjut Akom, korban yang tewas adalah anak-anak yang notabene merupakan generasi penerus bangsa. Oleh karena itu pihaknya berharap agar kepolisian terus mengusut kasus ini, sekaligus memperketat keamanan di semua wilayah Indonesia. Hal tersebut semata agar tidak terulang kembali kasus seperti ini.

Dikatakan Akom, tindakan terorisme terus mengancam bangsa ini. Oleh karena itu ia berharap Kepolisian dan TNI tidak lengah terhadap

ancaman tersebut. Negara berkewajiban melindungi keamanan dan kenyamanan setiap warganya. Di sisi lain, Akom juga menghimbau agar seluruh masyarakat Indonesia menjaga keutuhan NKRI.

"Sebenarnya, saya sangat khawatir saat demo besar lalu ditunggangi oleh aksi teroris. Namun alhamdulillah hal itu tidak terjadi. Namun sangat disayangkan hal itu terjadi di Samarinda. Kembali saya mengutuk keras hal itu. Sekaligus ikut berduka atas meninggalnya Intan, bocah yang menjadi korban bom tersebut," pungkasnya. ■

(Ayu), foto: andri/br.

Fadli Zon Terima Gerakan Ibu Negeri

Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam Fadli Zon menerima kunjungan perwakilan Gerakan Ibu Negeri, di ruang kerjanya, Gedung Nusantara III. Dalam pertemuan tersebut koordinator GIN Neno Warisman menyampaikan surat yang berisi tentang video pernyataan Jendral Tito Karnavian saat menjadi Kapolda Metro Jaya yang dinilai ada penyalahgunaan jabatan.

“ Karena kami orang awam, kami minta pak Fadli selaku wakil rakyat menelaah dan mengklarifikasi isi rekaman video atas pernyataan Jenderal Tito Karnavian saat menjadi Kapolda Metro Jaya dulu. Meminta DPR RI untuk mempertanyakan kebenaran video yang beredar di masyarakat itu," ujarnya di DPR RI, Senin (14/11).

Dalam video tersebut, Tito menyatakan mendapatkan anggaran sebesar Rp 80 miliar dari Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Hal itu dikatakan Tito dalam acara peresmian kantor Kepolisian Polda Metro Jaya.

Terkait aspirasi yang di sampaikan GIN, Fadli mengatakan akan



Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam Fadli Zon Terima Gerakan Ibu Negeri

mempelajari video tersebut terlebih dahulu, dan akan dilanjutkan ke Komisi yang bersangkutan dalam hal ini Komisi III. "Ini akan kita pelajari dulu suratnya. Tentu menjadi tugas DPR RI u n t u k m e n y a m p a i k a n ,

memperjuangkan, dan meneruskan apa yang menjadi keinginan tersebut," tuturnya.

Politikus Gerindra itu mengatakan akan meneruskan surat tersebut ke Komisi III DPR RI untuk ditindaklanjuti. Karena surat ini bentuknya pertanyaan, Fadli mengatakan, Komisi III nanti akan menanyakannya kepada Tito selaku mitra Komisi III.

"Ini akan saya teruskan ke Komisi III. Apakah pernyataan Kapolda Metro waktu itu apa bentuk penyalahgunaan atau pelanggaran, apakah itu mengandung masalah etika, disiplin, hukum dan lainnya, karena ini berbentuk pertanyaan maka akan kami sampaikan juga berbentuk pertanyaan yang bisa dijawab," kata dia. ■

(rmm/mp), foto: arief/br.

Ketua DPR RI Terima Kunjungan Dubes Arab Saudi

Ketua DPR RI Ade Komarudin didampingi Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Fahri Hamzah dan beberapa anggota Dewan melakukan *courtesy call* dengan Dubes negara Arab Saudi yang baru Mustafa Ibrahim Al-Mubarak di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/11).

“Selain membahas banyak hal, kami juga membicarakan mengenai tindak lanjut masalah pengawasan haji yang telah kami lakukan pada saat sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar ada perbaikan bagi jemaah haji kita di masa yang akan datang. Meski pelaksanaan ibadah haji tahun ini berjalan relatif lebih baik, namun kita ingin lebih baik lagi,” ucap Ade Komarudin.

Ia juga menyampaikan ucapan selamat datang kepada Duta Besar Arab Saudi. Akom, panggilan akrabnya, menyatakan sangat senang dan berharap kerjasama antara kedua negara akan terjalin lebih baik lagi.



Ketua DPR RI Ade Komarudin terima Dubes Arab Saudi

"Saya bersama dengan Anggota Dewan yang lainnya juga menyatakan sikap mengecam Milisi Houthi di Yaman, yang telah melancarkan serangan udara balistik

dari provinsi Sa'adah ke Mekkah Al-Mukaromah pada tanggal 27 Oktober 2016. Meskipun dapat digagalkan oleh tentara Arab Saudi, tetapi hal itu sangat berbahaya bagi tempat suci umat Islam," tandasnya.

Akom menegaskan, Dewan tidak ingin tempat suci umat Islam dunia tersebut diganggu oleh siapapun, terlebih lagi dilakukan oleh milisi, sekalipun dari negara Yaman, yang juga merupakan negara Islam. Apapun yang dilakukan oleh milisi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena sangat mengganggu tempat suci umat Islam dunia, termasuk juga umat Islam Indonesia. ■

(dpr.mp) / foto: andri/br.

Ketua DPR RI Dukung Usulan Pak Harto dan Gus Dur sebagai Pahlawan Nasional

Ketua DPR RI Ade Komarudin, mendukung usulan kedua tokoh yang pernah berjasa bagi negara Indonesia yaitu Presiden RI-2 Soeharto dan Presiden RI-4 K.H Abdurrahman Wahid (Gus dur) dinobatkan sebagai pahlawan nasional.



Ketua DPR RI Ade Komarudin

“Dua tokoh ini adalah orang berjasa bagi negeri ini, kenapa tidak kita berikan gelar pahlawan,” ungkap Akom sapaan akrabnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (10/11).

Namun, terlepas dari sisi kontroversinya Akom menambahkan Soeharto dan Gus Dur memiliki jasa yang banyak bagi Indonesia.

"Kita jangan lihat sisi kelemahannya, kita juga harus lihat sisi kehebatan untuk bangsa ini, dan dua tokoh ini orang yang berjasa untuk republik ini. Namun, kewenangan itu tidak pada kami, saya selaku pimpinan DPR RI hanya bisa merekomendasikan," tuturnya.

Seperti diketahui, Gus Dur

adalah Presiden yang pada masanya membolehkan kembali pertunjukan budaya China/Tionghoa di hadapan publik. Gus Dur juga menjadikan Imlek sebagai hari libur resmi nasional sekaligus mengakui Khong Hu Cu (Konfusianisme) sebagai agama resmi negara. Gus Dur juga mengganti nama provinsi Irian Jaya menjadi Papua yang merupakan nama awalnya.

Sementara, Soeharto atau yang lebih dikenal dengan Bapak Pembangunan Republik Indonesia, karena pada zamannya beliau memulai pembangunan infrastruktur di Indonesia. ■

(rnm.mp) / foto : andri/br.

Ketua DPR RI Yakin Presiden Konsisten Tak Intervensi Kasus Ahok

Ketua DPR RI, Ade Komarudin berharap elit politik tidak mengintervensi penegak hukum yang sedang dijalankan oleh Basuki Tjahjapurnama alias Ahok. Hal tersebut menyusul pertanyaan wartawan terkait gelar perkara yang dilakukan Bareskrim, Selasa (15/11).

“ Pernyataan Presiden Jokowi jelas bahwa beliau konsisten untuk tidak akan mengintervensi penegak hukum dalam kasus Ahok. Dan itu diucapkannya berulang-ulang di berbagai forum, baik saat bertemu dengan Kapolri, ulama bahkan partai politik. Saya masih meyakini presiden konsisten atas ucapannya itu,” jelas Akom, begitu wartawan biasa menyapa Ade Komarudin

Sebaliknya, lanjut Akom yang ditemui di acara kunjungan kerja Resesnya di Desa Cileduk, Burangkeng, Setu Kabupaten Bekasi Jawa Barat kemarin, Senin (14/11), ia berharap kepolisian juga dapat bersikap yang sama dengan Presiden. Mampukah Polri memberikan rasa keadilan pada masyarakat. Karena kalau hal itu tidak terpenuhi maka polisi sendiri yang akan repot. Begitupun halnya kepada para ulama, Politisi Partai Golkar ini yakin ulama dapat menenangkan dan menentramkan umatnya, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

"Untuk masyarakat sendiri, silahkan sampaikan pendapat,

pandangan dan sikap, tapi jangan anarkis. Tolong perhatikan kesatuan dan persatuan nasional. Seperti aksi damai 4 November lalu, sampai jam 6 sore kan berlangsung damai. Banyak yang memungut sampah, itu kan tanda baik. Karena menurut informasi yang saya dengar, aksi damai kemarin merupakan yang terbesar dalam sejarah dan paling damai. Demo tahun 1998 saja kalah besar dengan ini. Karena apa? Ini bukan urusan politik, yang memotivasi mereka. Mereka hanya tidak ingin agamanya dihina seseorang. Dan itu hak setiap orang. Agama apapun tidak boleh dihina," paparnya.

Ditambahkan Akom, masalah agama merupakan hal yang sangat



Ketua DPR RI Ade Komarudin

sensitif, jangan kita serempet sedikitpun walaupun kita merasa benar, apalagi dalam masa Pilkada DKI. Terlebih lagi yang diserempet adalah agama yang bukan merupakan agamanya. Oleh karena itu ia berharap agar para elit politik jangan bermain-main dengan agama apapun untuk kepentingan Pilkada. Sangat sensitif. ■

(Ayu), foto: andri/br

Aksi Demo 4 November Bukan Persoalan Pilkada

Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam Fadli Zon berpendapat aksi damai tanggal 4 November terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta non aktif, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, bukan persoalan persaingan pilkada tapi menyangkut keimanan seseorang.

“ Pak Jokowi kurang mengerti masalah. Masalah ini bukan pilkada. Kalau (masalah) persaingan pilkada, itu salah besar. Kalau ada, mungkin sedikit. Ini bukan persoalan pilkada melainkan keyakinan seseorang,” kata Fadli di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (14/11).



Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam, Fadli Zon

DPR RI Sampaikan Duka Mendalam Aksi Teror Bom Molotov di Samarinda

Ketua DPR RI Ade Komarudin menyampaikan simpati dan duka mendalam kepada para korban peristiwa aksi teror pelemparan Bom Molotov di Samarinda, Kalimantan Timur. "DPR RI mengutuk pelaku aksi tersebut, dan berharap kepolisian dapat segera bertindak tegas dan mengusut tuntas kasus tersebut," ujarnya saat membuka Masa Persidangan II tahun 2016/2017 di Ruang Paripurna, Senayan, Jakarta, Rabu (16/11).

DPR RI juga turut berduka yang sedalam-dalamnya atas tenggelamnya kapal *speedboat* di Batam yang mengangkut 101 pekerja migran ilegal yang di deportasi dari Malaysia yang menimbulkan korban jiwa. Juga terjadinya bencana alam di banyak daerah, seperti Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung dan Kota Bandung.

Atas kejadian itu, DPR RI mendorong pemerintah untuk memperketat pengawasan dan penjagaan di jalur pelintasan pekerja migran. Dan terkait bencana alam DPR RI mendesak pemerintah terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dalam pembangunan, sehingga dapat mengurangi resiko bencana ke depannya.

Akom juga menyampaikan, DPR RI telah menyelenggarakan *Senior Official Meeting* (SOM) yang intinya

Fadli menyangkan sikap yang diambil Presiden Jokowi pada saat unjuk rasa 4 November lalu. Ia beranggapan isu mulai bergeser soal dugaan penistaan agama karena muncul kesan Jokowi yang dinilai melindungi kasus tersebut.

"Kesan makin mencolok karena pada demo 4 November, Jokowi menghindari menemui perwakilan pengunjuk rasa. Ini mungkin tidak sepenuhnya kesalahan Pak Jokowi tapi orang di sekitarnya. Padahal saya membayangkan Presiden menerima ulama dengan baik, minum kopi, nasi kebuli," kata Fadli.



Pimpinan DPR RI

mendukung program 35.000 Mega Watt dengan fokus energi baru terbarukan, khususnya energi panas bumi. "DPR RI menghimbau Pemerintah mempercepat disahkannya Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengusahaan Panas Bumi," katanya.

Politisi Fraksi Golkar ini juga menyampaikan DPR RI menghormati aksi damai 4 November 2016 yang

Ia juga membayangkan Jokowi saat demo lalu mau menemui perwakilan pendemo dan mengatakan akan menegakkan hukum. Setelah itu Jokowi menemui para ulama. "Presiden bisa jadi pahlawan, padahal saya percaya Pak Jokowi merakyat akan menemui demonstran," katanya.

Terkait hal ini, menurut Politisi F-Gerindra pak Jokowi perlu mengembalikan kepercayaan publik dalam persoalan kasus penistaan agama tersebut. Karena publik sudah mulai merasakan bahwa ada upaya-upaya di luar prosedur hukum sehingga menyebabkan ada *distrust*

dilakukan oleh para Ulama, Kyai, dan Ustadz, serta umat Islam secara keseluruhan. Namun, DPR RI menyangkan terjadinya kerusuhan pasca-aksi damai tersebut. "DPR RI mengharapkan Kepolisian dan Pemerintah dapat lebih menjaga keamanan masyarakat tanpa menimbulkan korban dan berharap proses penegakkan hukum yang transparan dan adil terhadap kasus yang menjadi tuntutan masyarakat," tuturnya.

Dalam masa sidang ini, sambung Akom, DPR RI akan menerima kedatangan Perdana Menteri Kerajaan Belanda dalam rangka mempererat hubungan bilateral kedua negara dalam berbagai bidang. DPR RI juga akan menerima kunjungan ketua parlemen Libanon, Nabih Berri, guna mempererat kerjasama antar parlemen Indonesia dan Libanon.■

yang semakin melebar.

"Masalah ini harus disederhanakan, yang melakukan penistaan agama harus dihukum sesuai dengan yang diungkapkan oleh MUI. Masalah ini adalah masalah yang sangat sederhana tuntutan dari bagian besar umat Islam juga sangat sederhana yaitu penegakan hukum kasus Ahok. Jadi menurut saya jangan akal-akalan dan jangan bikin sandiwara ini menjadi panjang. Ini yang saya kira harus diselesaikan. Selesaikan hukum kembalikan apa yang menjadi fatwa MUI," pungkasnya.■

Kopi Darat Dekatkan DPR dengan Masyarakat

Sekretariat Jenderal DPR RI kembali menggelar acara 'Kopi Darat blogger dan netizen' guna mendekatkan DPR dengan masyarakat. Kegiatan ini berlangsung pada Kamis, (17/11) di *Operation Room*, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Dalam kegiatan kopi darat ini, masyarakat yang terdiri dari netizen dan blogger mendapatkan informasi terkait kegiatan DPR RI serta (tour building) mengunjungi seluruh sudut-sudut DPR RI yang di antaranya Museum DPR RI dan Ruang Rapat Paripurna.

Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial, Muhammad Djazuli saat membuka kegiatan ini mengatakan, acara kopdar ini dilakukan dalam upaya mendekatkan DPR RI dengan masyarakat. "Saya berharap pertemuan ini bisa lebih kenal DPR RI," ujar Djazuli.

Ia pun menegaskan, DPR RI adalah lembaga perwakilan rakyat

yang menjunjung tinggi keterbukaan informasi publik. Sebagai lembaga yang menjunjung tinggi asas keterbukaan, DPR RI memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memberikan kritikan agar dapat menjadi lebih baik. "Kritik apapun kita bisa terima, tentu ini agar DPR RI bisa lebih baik lagi," ujar Djazuli.

Ditambahkan, DPR RI memiliki tiga fungsi yakni legislasi, anggaran dan pengawasan. "DPR RI memiliki tiga fungsi yakni legislasi, pengawasan dan anggaran," terangnya.



Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial, Muhammad Djazuli

Selain itu Netizen dan Blogger berkesempatan langsung bertemu dengan wakil rakyat di antaranya Masinton Pasaribu (F-PDIP), Irma Suryani (F-Nasdem) dan Arif Suditomo (F-Hanura). ■

(bs.mpi)/foto:ipuat/ico

DPR RI Komitmen Selesaikan RUU Pemilu Tepat Waktu

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan DPR RI komitmen menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyelenggaraan Pemilu tepat waktu. Menurutnya, DPR RI bersama Pemerintah harus menyepakati tenggang waktu pembahasan RUU pemilu, yakni dua tahun sebelum hari pelaksanaan pemilu 2019 digelar.

“April paling lambat Mei harus sudah disahkan sehingga DPR RI bersama pemerintah harus punya komitmen yang sama untuk segera menyelesaikan RUU Pemilu,” tegas Supratman di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/11).

Diakuinya, akan ada beberapa poin krusial yang berkaitan dengan sistem pemilu yang akan dianut. Apakah tetap menggunakan sistem



Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas

terbuka atau terbuka terbatas seperti yang diusulkan pemerintah. Namun, jika pembahasan RUU

pemilu melebihi tenggang waktu pembahasan maka akan mengganggu proses tahapan pemilu. Untuk itu, DPR RI bersama Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu perlu bersinergi.

"Kalau tidak tercapai, berarti tahapan pemilu molor, otomatis hari H pemilu 2019 juga bisa molor, itu tidak boleh," tandas politisi F-Gerindra itu. RUU ini dinilai penting karena akan menandai babak baru dalam sejarah pemilu di Indonesia. Saat ini, DPR RI telah membentuk pansus RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu dan akan melakukan pembahasan secara maraton. Mengingat, RUU ini akan menjadi landasan dalam pemilihan umum tahun 2019 yang dilakukan secara serentak, yaitu Pemilu Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. ■

(am.mpi)/foto:rami/ico

Perhatian Pemerintah Pada Nelayan Sangat Baik

Seiring telah bergulirnya jaminan risiko kerja bagi para nelayan lewat program kartu asuransi nelayan, pemerintah dinilai sudah memberikan perhatian yang luar biasa terhadap kesejahteraan nelayan. Program asuransi nelayan sudah berjalan sangat baik.

Anggota Komisi IV DPR RI M. Dardiansyah menyampaikan hal tersebut di Merauke, Papua, Jumat (11/11), saat mengikuti kunjungan kerja untuk melihat dari dekat kelompok nelayan di Merauke. "Penilaian kami luar biasa atas pelaksanaan program ini. Perhatian Pemerintah terfokus ke wilayah timur."

Saat di Merauke, Komisi IV juga menyaksikan langsung pembagian kartu asuransi nelayan kepada para nelayan setempat. Dialog juga dilakukan untuk mengetahui berbagai kendala dan

risiko kerja yang selama ini dihadapi. Kehadiran delegasi Komisi IV ini disambut baik para nelayan. Untuk Kabupaten Merauke sendiri target kepemilikan kartu asuransi nelayan tahun ini mencapai 900-an.

"Kartu asuransi nelayan ini tentu sangat membantu kehidupan para nelayan. Risiko kerja mereka di laut luar biasa. Dan selama ini klaim asuransi sudah diberikan pemerintah kepada para nelayan yang meninggal saat bekerja." ■

(Rey), Foto: Rizka/br



Anggota Komisi IV DPR RI M. Dardiansyah

Waspadai Pelaku Teror di Daerah

Menanggapi peristiwa pelemparan bom molotov di depan Gereja Oikumene di Samarinda, Ahad (13/11), Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo meminta kepada seluruh aparat keamanan di daerah agar waspada. Menurutnya serangan bom tersebut menjadi petunjuk kecenderungan baru pelaku teror dalam melancarkan serangannya. Mereka tidak lagi melakukan serangan pada obyek vital di kota-kota besar seperti Jakarta.

“Serangan dengan target acak di daerah-daerah juga menjadi petunjuk

bahwa ruang gerak teroris di perkotaan semakin sempit.

Mereka coba melampiaskan kemarahan mereka di daerah-daerah. Karena itu, aparat keamanan di semua daerah harus waspada. Pola

serangan seperti di Samarinda dan Medan bisa saja dilakukan di daerah lain," jelas Bambang dalam rilis yang disampaikan kepada Parlemen.

Dia memaparkan pelaku teror melakukan serangan di daerah-daerah dengan target acak sekadar untuk membuktikan eksistensi mereka. Seperti diketahui, sebelum serangan pada sebuah gereja di Samarinda Ahad pagi, bulan Agustus lalu, teroris juga melakukan serangan bom pada sebuah gereja kecil di Medan.

Bambang juga mengingatkan dengan adanya tragedi-tragedi tersebut, menjadi bukti bahwa terorisme adalah ancaman nyata. Kendati terus diburu dan disergap oleh Detasemen 88 Antiteror Mabes Polri, sel-sel teroris di dalam negeri masih aktif.

"Bukti bahwa sel-sel teroris masih aktif bisa dilihat pada latar belakang pelaku pelemparan bom di Samarinda. Pelakunya adalah mantan napi yang terkait jaringan bom buku di Jakarta tahun 2011 dan kasus teror bom Puspitek di Serpong. Sang pelaku tercatat sebagai anggota kelompok JAT, dan berasal dari Bogor," papar Bambang. ■

(cto.mpi)/foto:arif/itu



Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo

DPR RI Temukan Persoalan Klasik Masalah Pupuk di Riau

Kunjungan kerja Komisi IV DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Herman Khaeron ke gudang pupuk di Provinsi Riau, menemukan beberapa persoalan klasik yang masih mengemuka. Ada selisih dan ketimpangan antara jumlah yang diusulkan dengan kuantum pupuk yang telah disepakati oleh DPR RI dan pemerintah.

“Kunjungan kami ke gudang pupuk masih menemukan persoalan klasik. Pemerintah bersama DPR RI sepakat untuk menetapkan kuantum pupuk itu diangka 9,55 juta ton, dengan varian di 5 jenis pupuk, yakni Urea, NPK, Jet A, SP36 dan Organik. Dari kuantum tersebut jika dibandingkan dengan usulan RDKK masing-masing daerah, masih terasa timpang dan masih selisih. Karena usulannya adalah 13 juta ton. Sehingga kalau terjadi kelangkaan pada masa tanam tertentu atau serentak, maka akan menjadi persoalan. Karena RDKK yang diajukan oleh pemerintah daerah ke pemerintah pusat, jumlahnya 13 juta ton, sementara kita baru bisa memenuhi 9,55 juta ton,” jelas Herman Khaeron.

Ia menyampaikan, ini akan menjadi bahan pemikiran, apakah perlu tambah kuantum atau harus mengurangi kuantum pupuk, lalu menaikkan terhadap kuantum pupuk jenis lainnya. Banyak persoalan yang harus didiskusikan, terutama dengan idealnya komposisi persatuan hektar, apakah akan mengikuti terhadap rekomendasi dari pupuk Indonesia dengan komposisi 532, atau hasil penelitian terbaru yang dikeluarkan oleh Balitbang Kementerian Pertanian dimana jenis-jenis pemupukan itu harus memperhatikan unsur hara tanah.

“Kalau unsur hara tanahnya tidak bisa mengikat terhadap pupuk dan kemudian diserap oleh tumbuh-tumbuhan yang bisa mempercepat tumbuh, memperkuat batang, mempercepat pematangan dan meningkatkan produksi pematangan, maka unsur hara tanah harus diperhatikan. Kami menemukan beberapa fakta di lapangan, bahwa urea masih lebih tinggi daripada hasil penelitian sesungguhnya,” ujarnya.

Terkait adanya upaya khusus (upsus) untuk padi (padi, jagung, kedele), Herman menerangkan, kalau tidak ada upsus saja masih bermasalah dengan kuantum pupuk dan jumlah pupuk yang harus tersedia, bagaimana dengan upsus yang dilakukan. Selain mengenai komposisi spesifik lokasi yang harus tepat, dan pertimbangan terhadap upaya khusus penambahan pupuk terhadap luasan pertanaman, juga tentang bagaimana menjaga efisiensi produktifitas, agar pupuk ini tersalurkan dengan baik, efisien dan yang paling penting adalah memberikan manfaat bagi para petani.

“Kami juga masih temukan adalah masalah gudang penyimpanan pupuk yang dikelola oleh PT. BGR yang merupakan BUMN pergudangan. Disana kami melihat suasana dan kualitas gedung yang sangat tidak representatif. Di beberapa kunjungan kami, memang banyak gudang yang tidak representatif, sehingga ke depan hal ini harus diperhatikan, karena kualitas pergudangan juga menentukan terhadap kualitas dan kuantitas pupuk, karena pasti ada penyusutan. PT BGR



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron tinjau gudang pupuk di Provinsi Riau

harus memperhatikan mengenai sistem pergudangan, supaya apa yang menjadi tujuan kita dengan 5 tepat, dapat benar-benar dilaksanakan dengan baik dan bermanfaat bagi rakyat,” pungkasnya. ■

(dep.mpf)

Bulog Didesak Evaluasi Pendistribusian Raskin

Anggota Komisi VI DPR RI, Endang Srikarti Handayani mendesak agar Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) melakukan evaluasi dalam Pendistribusian raskin atau rastra. Pasalnya setelah reses, Endang mendapati keluhan dari masyarakat, raskin yang didistribusikan berkualitas buruk. Bahkan penerima raskin enggan untuk mengkonsumsi raskin dari Bulog.

“Saya minta manajemen Bulog wajib dievaluasi. Karena Bulog-Bulog di daerah kinerjanya kurang bisa dipercaya. Dapat dilihat dari kualitas berasnya tidak bagus, mutunya

Merauke Bisa Jadi Penyuplai Pangan Nasional

Kabupaten Merauke sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Kekayaan pertanian dan perikanannya luar biasa. Karenanya, bisa jadi penyuplai pangan nasional.

Demikian disampaikan Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo usai bertemu Wakil Bupati Merauke di Merauke, Papua, Jumat (11/11/2016). Dengan menjadi penyuplai pangan nasional, pemerintah tak perlu lagi melakukan impor pangan.

"Di Merauke ada jenis tebu endemik yang sangat bagus sebagai bahan baku produksi gula. Pertanian dan perikanannya juga sangat luar biasa. Jadi, kita berkunjung ke sini untuk mengetahui apa saja kendala yang masih ditemukan sebagai lumbung pangan nasional," urainya kepada pers.

Otoritas pertanian setempat memaparkan, kendala utama di Merauke adalah infrastruktur pertanian dan alih lahan, dari hutan menjadi areal sawah. Infrastruktur yang dimaksud adalah jaringan irigasi yang belum banyak dibangun.

Sementara alih lahan masih jadi



Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo saat meninjau area cetak sawah baru di Merauke

kendala lain di lapangan. Banyak petani di Merauke yang menginginkan kepastian alih lahan agar bisa digarap menjadi area persawahan. Ini butuh bantuan kementerian terkait agar alih lahan menjadi jelas.

Sebelumnya, dalam pertemuan dengan Wakil Bupati dan jajaran

SKPD lainnya, Edhy menegaskan, Merauke bisa jadi kawasan yang hebat dan luar biasa di Indonesia, karena kekayaan sektor pertanian dan perikanannya. "Mestinya, kehebatan Merauke ini sudah bisa diangkat sejak lama," kilah politisi Partai Gerindra itu. ■

(mb) foto:huwari/mr.



Anggota Komisi VI DPR RI Endang Srikanti

menurun," papar Endang sebelum pembukaan masa sidang, di ruang Paripurna DPR RI, Nusantara II, Rabu (16/11).

Dia meminta, Dirut Bulog beserta jajarannya melakukan evaluasi

internal. Jangan hanya berpedoman dari laporan normatif saja, diperlukan pemantauan langsung agar dapat mengatasi masalah yang masih kerap terjadi. "Perlunya Dirut dan jajarannya melakukan evaluasi ke bawah. Jangan hanya percaya dengan laporan-laporan," tandasnya.

Selama masa reses, Anggota Dewan dari Dapil Jawa Tengah V ini telah menyerap aspirasi masyarakat, dan ternyata raskin yang diperuntukkan bagi rumah tangga golongan tidak mampu, berkualitas buruk.

"Kulitas beras yang buruk ditemukan di dapil saya. Pada saat reses kita kumpulkan masyarakat khususnya penerima raskin itu, dan lurahnya kita kumpulkan semuanya. Sejauh mana implementasi raskin,"

jelas Endang.

Dia juga menjabarkan, muara permasalahan pendistribusian beras berkualitas buruk ada di dalam Bulog, bukan produksi beras di petani. Sesuai dengan hasil sidak yang dilakukan Endang, rusaknya beras karena penyimpanan yang tidak bagus. Selain itu menurut dia ada praktik-praktik kecurangan antara Bulog dan tengkulak beras, dua pihak ini dianggap mengoplos beras bagus dengan beras buruk.

Terlebih lagi, dia mengatakan Bulog sulit diajak berkomunikasi untuk mendiskusikan solusi pemecahan masalah. "Bulog diajak komunikasi susah. Perbaikan ini butuh komunikasi," ujar Endang. ■

(eko,mp) foto: jidar/ria.

Terorisme Bertentangan dengan Pancasila

Anggota Komisi VIII DPR RI, Khatibul Umam Wiranu menyesalkan dan mengecam peristiwa pengeboman Gereja Oikumene di Samarinda, Kalimantan Timur, pada Minggu 13 November 2016 lalu. Ia menilai tindakan pelaku sangat tidak beradab dan bertentangan dengan Pancasila.

“ Mengecam dan mengutuk keras aksi pengeboman Gereja Oikumene Samarinda yang dilakukan orang-orang atau kelompok yang tidak berperikemanusiaan, tidak beradab, dan tidak beragama. Tindakan mereka bertentangan dengan Pancasila, agama, konstitusi negara, serta undang-undang,” ujarnya dalam rilis yang diterima Parlemen, Senin (14/11).

Politisi Demokrat itu menilai bangsa Indonesia menghadapi ujian berat setelah aksi terorisme dalam bentuk pengeboman Gereja Oikumene Samarinda. Khatibul menduga pelaku dan perencana pengeboman memiliki motif adu domba antarpemeluk agama yang berbeda, membuat situasi sosial masyarakat saling curiga dan bisa menciptakan konflik sosial yang lebih luas.

Ia pun meminta aparat penegak hukum harus menemukan jejaring kelompok ini secara tuntas agar tidak

terjadi aksi pengeboman di tempat lain. “Menghukum mereka seberat-beratnya sesuai UU Antiterorisme serta UU lain yang berlaku,” tegas Khatibul.

Ia kemudian meminta pemerintah menuntaskan pekerjaan rumah (PR) memberantas kekerasan dan aksi terorisme yang bersumber dari pemahaman keagamaan yang ekstrem.

“Harus dapat diantisipasi oleh pemerintah, dicarikan jalan keluarnya (khususnya oleh Kementerian Agama), dan pendekatan persuasif, serta pendidikan keagamaan yang benar, menjadi pilihan yang harus diutamakan oleh pemerintah,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, ledakan



Anggota Komisi VIII DPR RI Khatibul Umam Wiranu

terjadi di Jalan Ciptomangunkusumo, Kelurahan Sengkotek, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda. Pelaku menaruh bom persis di depan rumah ibadah. Tercatat ada lima korban dalam peristiwa ini dan seorang meninggal dunia. ■

(b.s.mp), foto: rmi/br.

Pelaku Teror Bom Samarinda Pengecut

Linda Megawati, Anggota Komisi VIII DPR RI, mengutuk aksi pelemparan bom molotov yang dilakukan oleh seorang pria ke depan Gereja Oikumene Samarinda. Aksi itu mengakibatkan beberapa anak-anak teluka. Bahkan satu diantaranya, Intan Marbun yang berusia 2,5 tahun, meninggal dunia.

“ Saya sangat mengutuk tindakan pelemparan bom molotov tersebut. Itu adalah perbuatan dari orang pengecut,” ujar politisi Demokrat Dapil IX Jawa Barat ini. “Saya juga menyampaikan simpati dan duka cita mendalam kepada para korban baik yang luka-luka maupun meninggal dunia,” tegasnya dalam rilis yang diterima Parlemen, Senin (14/11).

Saat ditanya apakah pelemparan bom molotov itu merupakan tindakan terorisme atau bukan, Linda menjawab belum dapat memastikannya. “Kita tunggu laporan

dari polisi. Pelakunya kan sudah ditahan dan sedang dimintai keterangannya,” kilah dia.

Yang pasti, lanjut politisi dari Partai Demokrat ini korban pelemparan bom molotov ini adalah anak-anak. “Dan isu anak-anak adalah salah satu isu utama dari Komisi VIII DPR RI dimana saya berada di dalamnya. Makanya saya cukup *concern* dengan peristiwa ini,” tutur Linda.

Politisi Demokrat dari Dapil Jabar ini mengatakan, tidak habis pikir bagaimana pelaku itu bisa begitu bodoh melempar bom molotov ke



Linda Megawati, Anggota Komisi VIII DPR RI

kerumunan orang yang di dalamnya terdapat anak-anak. Menurutnya, kejahatan terbesar adalah kejahatan yang melibatkan anak-anak baik sebagai pelaku maupun korban.

"Karena itu, apapun motifnya, baik kriminal biasa ataupun teror,

pelaku harus dihukum seberat-beratnya karena melibatkan anak-anak di dalamnya sebagai korban. Ini adalah sebuah tragedi" tegas Linda.

Dari kasus ini, Linda menghimbau kepada masyarakat untuk tetap bersikap normal serta

tidak terprovokasi, tidak terpengaruh oleh berbagai informasi yang menyebar di berbagai media, khususnya media sosial. "Tunggu dan percayakan kepada aparat yang berwenang," pungkasnya. ■

(sf), foto: kresna/bc

Komisi IV Pantau Potensi Pertanian dan Peternakan di Bali

Provinsi Bali dikenal sebagai destinasi pariwisata internasional, namun ternyata Bali memiliki potensi luar biasa selain di bidang pariwisata. Sentra pertanian dan peternakan ternyata memiliki potensi yang sangat tinggi di Provinsi Bali.

Ketua Tim Kunker Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto atau biasa akrab disapa Titiek Soeharto di sela-sela kunjungannya Minggu (12/11) di daerah Konservasi Terumbu Karang di Pulau Serangan Bali mengatakan bahwa kunjungan Komisi IV DPR RI ke Bali dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan.

"DPR RI ingin menyerap aspirasi dari masyarakat untuk disampaikan pada pemerintah. Komisi IV telah mengunjungi sejumlah tempat di Bali terkait pertanian, peternakan dan perikanan," ungkap Titiek.

"Kita telah mengunjungi Bulog untuk memastikan bahwa persediaan beras cukup untuk enam bulan ke depan. Kualitas berasnya pun sangat baik," jelasnya.

Dalam kunjungannya ke Bulog, Tim Kunker Komisi IV DPR RI menyerahkan secara simbolis Beras Rastra (Beras untuk Rakyat Sejahtera) kepada perwakilan masyarakat di Gudang Bulog Kab.Badung Bali.

Komisi IV DPR RI juga meninjau Sentra Peternakan Rakyat (SPR) Jayagiri di Kabupaten Badung, dimaksudkan untuk mengecek langsung kesiapan dalam rangka upaya swasembada daging.

"Bali sangat memungkinkan untuk menjadi salah satu sentra produksi daging dalam skala besar, sehingga peternaknya perlu terus dibina dan dikembangkan," terang Titiek.

"Budidaya di Sentra Peternakan

Rakyat Jayagiri di Kabupaten Badung ini bagus sekali buat masyarakat. Keberhasilan getah birahi itu bagus juga, s a n g a t mem u a s k a n, sapi jantannya bisa mencapai 500 kg itu bagus s e k a l i , " terangnya.

Politisi

Partai Golkar ini juga menyampaikan bahwa Komisi IV DPR RI juga telah mengunjungi sentra penelitian mangrove di Denpasar. Secara keseluruhan, Bali memiliki mangrove seluas 30 ribu hektar. Total ada 1,3 juta hektar di seluruh Indonesia.

"Indonesia sangat kaya akan mangrove, sebanyak 20 persen spesies mangrove dunia ada di Indonesia. Pesisir kita masih luas jadi masih harus ditingkatkan," ungkapnya.

Dalam kunjungan ke BPDASHL Kementerian Pertanian Bali, Komisi IV DPR RI melihat potensi yang bisa terus dikembangkan, seperti dalam program pembibitan gratis. Masyarakat bisa mengambil sejumlah bibit secara gratis, diantaranya bibit durian, jambu, dan sengon.

"Paling banyak peminatnya itu sengon, karena tujuh tahun itu bisa panen dan pemasukannya untuk masyarakat, Bali juga



Ketua Tim Kunker Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto

memiliki pusat pelestarian terumbu karang di Serangan," terang Politisi Partai Golkar ini.

"Kita baru saja melihat sekelompok pemuda melestarikan terumbu karang setelah diberi pelatihan oleh pemerintah. Hingga akhirnya saat ini pelestarian berjalan sukses dan terus berkembang. Mereka membanggunya di lingkungan yang hampir rusak karena reklamasi. Mereka melakukan pelestarian dengan transplantasi, kita patut berbangga karena masih banyak yang peduli dengan ekosistem laut kita," jelas Titiek.

Politisi dari Dapil Yogyakarta ini menambahkan, potensi-potensi tersebut tentu akan menjadi salah satu alternatif wisata di Bali. Titiek berharap daerah lain mampu mencontoh Bali untuk terus mengembangkan segala bentuk potensi yang ada di daerah masing-masing. ■

(skr)/pawingsib/ru.

Fauzih Amro Kritik Perusahaan yang Hanya Raih Keuntungan Tapi Tak Peduli Lingkungan

Kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke PT. Indah Kiat di Provinsi Riau, untuk mendengar secara langsung penjelasan dan klarifikasi dari pihak perusahaan itu, terkait beberapa laporan yang diterima oleh anggota Dewan dari masyarakat sekitar perusahaan dan juga dari pemerintah daerah. Anggota Komisi IV DPR RI Fauzih Amro mengatakan bahwa penjelasan yang dilakukan oleh PT. Indah Kiat kepada Komisi IV bersifat sepihak.

“Penjelasan mereka bagus dan sah-sah saja, tetapi bersifat sepihak. Sementara kita juga telah mendapat laporan dari masyarakat dan juga Pemda nya,” tandas Fauzih di sela-sela kunker Komisi IV ke Provinsi Riau, Selasa (15/11).

Ia juga menyampaikan bahwa PT. Indah Kiat menggarap lahan hampir seluas 300 ribu hektar, tetapi pajak yang disumbangkan ke negara hanya



Komisi IV DPR RI Fauzih Amro

sebesar 20 miliar. Menurutnya, angka tersebut terlalu kecil.

"Ke depannya kita berharap, ada 20 sampai 30 persen dari 300 hektar tersebut menjadi hutan kawasan yang tidak boleh diproduksi," ucapnya.

Pada prinsipnya kehadiran perusahaan di manapun berada harus memberikan efek yang positif bagi masyarakat sekitarnya, lanjutnya, bila terjadi perampokan atau kriminalisasi terhadap suatu perusahaan, hal itu sebagai bagian dari akibat perusahaan tidak hadir dan tidak bisa memberikan kontribusi yang nyata terhadap masyarakat di sekitarnya.

"Hal ini terjadi di mana-mana, CSR itu hanya di mulut, tidak dilaksanakan. CSR hanya menjadi bagian supaya dilihat bahwa suatu perusahaan itu memiliki CSR, padahal penerapan pada kenyataannya tidak ada," tegas Fauzih.

Ia mengatakan, kalau suatu perusahaan menjalankan dengan benar CSR sesuai tupoksinya, maka masyarakat di sekitar hutan dan kebun akan lebih sejahtera hidupnya, dan tidak menimbulkan dampak sosial negatif. Sementara yang terjadi di perusahaan Indah Kiat itu adalah masih banyak gejala-gejala sosial, hampir 30 alat berat milik perusahaan ditahan.

"Oleh karenanya yang menjadi pertanyaan dasar bagi kita adalah apa yang sebenarnya terjadi. Sebab saya yakin, kalau perusahaan menjalankan tupoksi dan CSR dengan baik, maka masyarakat di lingkungan sekitar perusahaan itu, lebih sejahtera kehidupannya, dan perusahaan pun dapat menikmati keuntungannya. Namun banyak perusahaan yang hanya ingin mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, tetapi tidak peduli terhadap lingkungan di sekitarnya," pungkasnya. ■

(ik), Foto: Jakub

Komisi I Kutuk Keras Pengeboman di Samarinda

Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari mengutuk keras aksi pengeboman yang terjadi di Gereja Oikumene, Samarinda. Dia meminta Kepolisian agar segera melakukan penindakan hukum secara cepat dan lugas. Baginya tindakan tersebut jelas bertentangan dengan sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, yang tertuang dalam Pancasila.

“Saya sebagai Ketua Komisi I DPR RI mengutuk keras atas pengeboman gereja dan tempat ibadah manapun, karena itu sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip kehidupan bernegara, apalagi dilandasi oleh Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu saya meminta kepada Polri untuk secepatnya melakukan proses hukum secara cepat dan lugas,” papar Abdul dalam rilis yang disampaikan kepada Parlemen, Ahad, (13/11).

Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menyinggung peran Badan Intelijen Negara (BIN), yang dinilai belum maksimal menjalankan tugas. Menurutnya bilamana BIN memiliki sistem yang terstruktur dan kuat, kegiatan pengeboman yang terjadi di salah satu gereja tersebut pasti dapat diantisipasi lebih awal sehingga tidak akan memakan korban.

DPR RI Berikan Pendidikan Politik untuk Generasi Muda

Deputi Bidang Persidangan Damayanti menyampaikan kebanggaannya kepada para peserta Parlemen Remaja 2016 pada saat melakukan simulasi Rapat Paripurna membahas Rancangan Undang-Undang Holtikultura di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (10/11).

“Jadi kegiatan ini sebetulnya sudah sering diadakan, tapi mungkin tiap tahun ada perbaikan. Saya melihat tahun ini materinya bagus. Jadi saya sangat bangga sekali. Apalagi saat melihat tadi bagian terakhir dari acara ini sangat mirip sudah dengan sidang DPR RI,” ujar Damayanti.

Acara yang diikuti 136 peserta dari 34 provinsi siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) di Indonesia tersebut sebagai pendidikan politik bagi generasi muda. Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari pemerintah khususnya Departemen Pertanian. "Para peserta dibekali dengan informasi yang cukup dan ada peran serta dari pemerintah juga khususnya Departemen Pertanian yang menaruh perhatian," tegasnya.

Pendidikan politik bagi remaja ini merupakan amanat dari *Inter-Parliamentary Union* (IPU), sebagai sosialisasi kepada masyarakat tentang fungsi legislasi DPR RI yang sesungguhnya. Kegiatan ini



Deputi Bidang Persidangan Damayanti bersama peserta Parlemen Remaja

juga memberikan pengertian agar remaja tidak alergi pada politik, karena hakikatnya politik bertujuan pada kesejahteraan masyarakat.

"Ini sebetulnya amanat dari *Inter-Parliamentary Union* (IPU) yang minta untuk diadakannya Parlemen Remaja, tujuannya yaitu

mendidik kader-kader atau anak-anak muda berpolitik sejak dini. Kedua, buat kita adalah mensosialisasikan kegiatan Anggota di DPR RI sesungguhnya sebagai fungsi legislasi yang berguna bagi banyak orang," ungkapnya. ■

(caur/eko), foto : arief/br.



Pimpinan Komisi I DPR RI

Abdul Haris yang saat tragedi tersebut sedang melakukan kegiatan reses di lereng Gunung

Merapi, Magelang, Jawa Tengah, mengungkapkan, Komisi I DPR RI akan mempertanyakan

masalah tersebut kepada BIN. "Kami akan memanggil BIN untuk melakukan koordinasi terkait dengan adanya aksi bom ini mengapa bisa sampai terjadi," ungkapnya.

Dia berharap BIN dapat segera menyelesaikan permasalahan ini dengan cepat, sekaligus melakukan evaluasi internalnya. "Saya harap setelah Pak Budi Gunawan selesai melakukan evaluasi dan pembenahan ke depan permasalahan ini dapat diantisipasi lebih dini," ia menambahkan. ■

(eko), Foto: Iwan/br.

Jelang Natal dan Tahun Baru, Stok Beras di Bali Aman

Badan Urusan Logistik (Bulog) Denpasar menjamin stok beras di Bali masih aman menjelang Natal dan Tahun Baru 2017. Hal ini dikonfirmasi saat Tim Kunker Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan ke Gudang Bulog Denpasar, Sabtu (12/11).

S ebagaimana disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI I Made Urip bahwa terkait stok pangan terutama masalah beras di Bali hampir tidak ada gejolak-gejolak yang berarti



Anggota Komisi IV DPR RI I Made Urip SKR

karena produktivitas beras yang dihasilkan oleh petani Bali cukup memenuhi kebutuhan di Bali kecuali petani Bali mengalami gagal panen tentu akan memengaruhi kondisi stok beras di Bali.

"Secara umum setiap tahun di Bali tidak pernah mengalami gejolak kekurangan beras, malahan harga pemberian pemerintah terutama gabah kering panen di Bali melebihi Harga Pembelian Pemerintah (HPP)," ungkap I Made Urip yang merupakan Anggota DPR RI Dapil Bali.

Sementara Anggota Komisi IV lainnya, Ibnu Multazam juga menegaskan bahwa stok beras di Bali

sangat mencukupi. "Kan ada 2500 ton, dan pasti akan terus bertambah, artinya bertambah itu Kadivreg Bali tadi mengatakan bekerja sama dengan Kadivreg Jawa Timur untuk mendatangkan beras dari Jawa Timur, baik itu untuk raskin maupun untuk cadangan beras pemerintah," ungkap Multazam.

"Jadi kita tidak perlu resah, cadangan pemerintah cukup, untuk raskin cukup," ungkapnya.

Disamping mengecek ketersediaan beras di Gudang Bulog Denpasar, Komisi IV DPR RI juga menyerahkan secara simbolis beras untuk keluarga sejahtera (rastra) kepada perwakilan masyarakat yang hadir di Gudang Bulog Denpasar. ■

(skr)

Sudah Tepat, Merauke Ditetapkan Sebagai Lumbung Pangan Nasional

Penetapan Kabupaten Merauke, Papua, sebagai lumbung pangan nasional oleh pemerintah, dinilai sudah tepat. Kabupaten Merauke masih memiliki lahan yang sangat luas untuk membuka kembali areal sawah. Potensi pertanian Merauke juga luar biasa.

A nggota Komisi IV DPR RI Saniatul Lativa mengatakan hal tersebut di Merauke, usai mengikuti rangkaian kunjungan kerja ke kabupaten paling timur Indonesia itu, Sabtu (12/11). "Merauke punya potensi pertanian yang luar biasa. Sudah tepat pemerintah menetapkan Merauke sebagai lumbung pangan nasional. Belanda sendiri dahulu membangun pengairan sawah di lintang selatan, karena potensinya lebih besar daripada lintang utara."

Komisi IV sudah melihat dari dekat pembukaan lahan untuk cetak sawah baru di Distrik Kurik, tepatnya di Kampung Salor, Merauke. Di sektor A ada 163 hektar lahan yang sudah ditanami dari usulan luas lahan 338 hektar. Secara keseluruhan di tiga distrik di Merauke ada 2000 hektar lahan yang dibuka dan

1.086 hektar diantaranya sudah ditanami. Tinggal persoalan yang dihadapi adalah infrastruktur pertanian seperti irigasi dan jembatan.

Kepada Parlemenaria, Sani menambahkan, Komisi IV akan terus mendorong agar kekurangan yang terlihat di lapangan bisa segera diatasi. Di Distrik Kurik ternyata masih mengandalkan irigasi tadah hujan. Kanal-kanal untuk menampung air hujan di sekitar area sawah dibangun. Tapi irigasi ini hanya bersifat sementara, tidak bisa untuk jangka panjang. Harus dibangun sistem irigasi terpadu.

"Kalau menurut ahli, air harus diambil



Anggota Komisi IV DPR RI Saniatul Lativa

dari Kabupaten Boven Digul yang bersebelahan. Memang anggarannya untuk proyek ini sangat besar. Tapi, harus kita pikirkan, kalau ini berhasil, hasilnya pun sangat besar dan manfaat ekonomi bagi masyarakat di sini sangat luar biasa," ungkap politisi Partai Golkar itu. ■

(mb)/foto:huen/ru.

RUU Jabatan Hakim Disusun Agar Hakim Lebih Profesional

Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim (RUU JH) yang saat ini dibahas DPR RI bersama pemerintah dengan harapan agar dalam menjalankan tugasnya, hakim lebih profesional, independen, dan berintegritas. Sehingga bisa berusaha semaksimal mungkin putusan hukumnya bisa memenuhi keadilan masyarakat. Rencananya RUU JH akan disahkan pada masa sidang DPR RI akhir tahun 2016 ini. RUU ini mengatur sejak rekrutmen, posisi, status, pengawasan, dan sebagainya,

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPR RI F-PDIP Masinton Pasaribu dalam forum legislasi "RUU Jabatan Hakim" bersama mantan hakim dan pengajar hukum pidana Usakti Asep Iwan Iriawan, dan anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (10/11).

Selain itu, seseorang sejak diterima sebagai hakim akan disumpah langsung oleh Presiden RI. Karena itu proses rekrutmennya akan lebih ketat dan profesional. Misalnya sarjana hukum dari perguruan tinggi terpercaya, berusia minimal 30 tahun, berpengalaman 5 tahun. Baik di kepolisian, jaksa, notaris, administrator, dan sebagainya. "Status mereka ini adalah pegawai negeri sipil (PNS), kecuali hakim *ad hoc*. Dengan begitu, maka hakim diharapkan mengabdikan kepada negara," tegas Masinton.

Selama ini, kata Masinton, status hakim sebagai PNS (eksekutif) tapi menjalankan tugas-tugas yudikatif. Baik administrasi, keuangan, dan lain-lain. Sementara itu di daerah meski dipanggil yang mulia, tapi para hakim itu banyak yang masih ngontrak rumah. "Di RUU ini, maka hakim dan keluarganya dijamin oleh negara, sehingga dalam menjalankan tugasnya mengabdikan untuk negara karena posisinya sama dengan pejabat negara yang lain," tambahnya.

Dengan demikian tegas Masinton, hakim tidak perlu lagi mengatur keuangan, administrasi, penjenjangan karir dan sebagainya. Langkah itu demi keluhuran, kemuliaan, dan kehormatan hakim dalam menjalankan tugasnya.



Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu

"Mereka ini termasuk di Mahkamah Agung akan dievaluasi setiap 5 tahun," pungkasnya.

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mengakui jika pihaknya selama ini banyak mendapat keluhan masyarakat. Karena itu ORI melakukan investigasi dan ternyata memang terjadi banyak penyalahgunaan dalam hal prosedural, wewenang, mutasi, jenjang jabatan, perilaku hakim ada yang menjadi calo, dan sebagainya.

"Tugas hakim di luar pengadilan itu banyak irisan-irisan yang bersinggungan dengan masyarakat. Untuk itu hakim harus mempunyai kepemimpinan politik yang baik, agar mampu mengatasi keluhan masyarakat. Kalau tidak, maka akan

mendistorsi hakim sebagai penegak hukum dan bukannya sebagai pelayan keadilan," jelas Ninik.

Yang perlu ditegaskan lagi kata Ninik, soal pengawasan hakim MA seharusnya bukan oleh MA sendiri. "Itu sama dengan jeruk minum jeruk. Seharusnya pengawasan itu oleh lembaga independen. Seperti Komisi Yudisial (KY), yang kewenangannya memang perlu diperkuat," pungkasnya.

Sementara, Asep menilai apa yang ada di RUU JH ini sebagian sudah diatur dalam UU MA. "Kalau sama, sebaiknya bukan RUU JH, tapi revisi UU MA dan badan-badan peradilan di bawahnya. Soal usia pensiun misalnya, kalau 65 tahun itu dipastikan tidak ada masalah. Tapi, kalau sudah 70 tahun, maka sudah mulai banyak masalah. Misalnya, salah mengetik, salah mengambil keputusan, dan lain-lain," katanya.

Karena itu dia mengusulkan agar MA berani melakukan terobosan misalnya merekrut calon hakim putra terbaik bangsa ini dari perguruan tinggi terpercaya di Indonesia. Seperti sarjana hukum dari UI, Unair, UGM, USU, Undip, dan lain-lain. Mereka harus dimotivasi bukan menjadi orang kaya, melainkan untuk mengabdikan kepada negara dan dijamin oleh negara. "Jadi, hakim itu memang tidak bisa kaya," ujarnya. ■

Pimpinan DPR RI Dorong Komisi III Kawal Penegakan Hukum Ahok

Lima Pimpinan DPR RI secara lengkap menerima kunjungan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI. Kunjungan unsur masyarakat yang menghipum ormas-ormas Islam ini menyampaikan keluhan kepada para Pimpinan DPR RI, terkait sikap Presiden Joko Widodo yang tak menemui perwakilan massa Demo 4 November.

Para delegasi ormas Islam yang dipimpin oleh Ketua Dewan Pembina GNPF MUI Muhammad Rizieq Shihab juga mengharapkan agar DPR RI menggunakan hak konstitusionalnya dalam mengawal dan mengawasi proses penegakan hukum kepada Gubernur DKI nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Menanggapi permintaan tersebut Ketua DPR RI Ade Komarudin akan menyampaikan amanat yang disampaikan GNPF MUI kepada Komisi III DPR RI, sebagai AKD yang membidangi persoalan hukum. Akom, begitu Ketua DPR RI bisa disapa, juga mendorong Komisi III agar mengawal dan mengawasi proses penegakan hukum dalam kasus ini agar berjalan secara adil. Dia pun hendak berkomunikasi dengan para Pimpinan Fraksi, terkait aspirasi yang disampaikan tersebut, dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus).

"Kami akan mendorong dan mengkomunikasikan ini kepada alat kelengkapan yang bertugas untuk melakukan pengawasan di sektor penegakan hukum, yaitu Komisi III. Yang juga kemarin 4 November memberikan advokasi kepada demonstran yang berjalan damai tersebut," papar Akom dalam sambutannya kepada para delegasi GNPF MUI, di ruang tamu Pimpinan DPR RI, Nusantara III, Kamis (17/11) sore.

Akom didampingi oleh seluruh



Ketua DPR RI Ade Komarudin berjabat tangan dengan Ketua Dewan Pembina GNPF MUI Muhammad Rizieq Shihab

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, Agus Hermato, Fahri Hamzah, dan Taufik Kurniawan. Hadirnya seluruh Pimpinan DPR RI ini merupakan bentuk apresiasi DPR RI kepada para ulama dan habib-habib yang telah mengawal aksi damai 4 november. "Kita apresiasi pada habib dan ulama yang telah mengawal aksi itu sehingga berlangsung secara damai," ujar Akom.

Mantan Ketua HMI ini juga menjelaskan kepada para delegasi GNPF MUI bahwa fungsi para Pimpinan DPR RI tidak bisa memerintah para Anggota DPR RI secara sepihak. "Fungsi kami berlima di sini sebagai speaker dari Dewan Perwakilan Rakyat. Kami juga tidak punya hak memerintah anggota dewan, karena hak kami sama. Sebagai pimpinan kami hanya juru bicara," jelas Akom.

Rizieq Shihab sebagai

pembicara utama dari GNPF MUI juga menyampaikan bahwa aksi damai 4 November bukanlah upaya kudeta kepada pemerintahan yang sah. Dia juga mengharapkan kepada pemerintah agar tidak menggunakan militer untuk menakut-nakuti rakyat. Pemimpin FPI ini juga menyadari bahwa penistaan agama apapun, bukan hanya Islam, tidak dibenarkan dalam undang-undang. "Kami ingin ini diselesaikan secara konstitusional," ujar Rizieq.

Di akhir diskusi, Akom mengatakan bahwa Islam Indonesia adalah agama yang tidak akan menggunakan jalur non konstitusional. "Itulah kemurnian gerakan ini. Islam Indonesia, Islam yang damai, Islam yang ikhlas mengabdikan pada umat dan negaranya, dan itu digambarkan pada aksi 4 November itu," pungkasnya. ■

JENDELA PARLEMEN

Sampaikan aspirasi Anda melalui SMS ASPIRASI DPR RI di 08119443344
@dpr_ri DPR RI @DPR_RI DPR RI



Ketua DPR RI menerima Dubes Saudi untuk Indonesia Mohammad Abdullah Al Shuaibi



Ketua DPR RI menerima forum silaturahmi anak bangsa



Wakil Ketua DPR RI bidang Korekku Taufiq Kurniawan menerima Pejabat Kedubes Portugal untuk Indonesia



Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam Fadli Zon menerima HMI



Bagian Medtaksos Setjen DPR RI studi banding ke PT. Telkom



ANGKASA PURA II
INDONESIA'S AIRPORT COMPANY

MAJALAH DAN BULETIN PARLEMENTARIA DPR RI

**KINI HADIR DI
TERMINAL 3 ULTIMATE
BANDARA SOEKARNO-HATTA**



Kerjasama Biro Pemberitaan Parlemen
Setjen DPR RI Dengan PT. Angkasa Pura II